

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pariwisata merupakan salah satu alat dan sarana bagi Pemerintah untuk menambah pendapatan daerah, menambah lapangan pekerjaan, serta mendorong kegiatan-kegiatan industri dan juga sebagai sarana rekreasi bagi masyarakat. Selain hal itu, pariwisata merupakan cara untuk memperkenalkan keindahan dan juga keunikan dan kekhasan dari suatu daerah.

Menurut ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pariwisata menyebutkan bahwa tujuan dari pariwisata satu di antaranya adalah untuk menunjang penambahan ekonomi, menunjang kesejahteraan masyarakat, penghapusan kemiskinan, mengentaskan pengangguran, pelestarian lingkungan/alam, lingkungan dan sumber daya, memajukan kebudayaan, meningkatkan citra bangsa, memupuk rasa cinta tanah air, memperkuat jati diri dan kesatuan bangsa, dan mempererat persahabatan bangsa

Pariwisata yang berada di Indonesia memiliki potensi yang sangat besar, terutama wisata bahari, sehingga perlu dan patut untuk dilestarikan dan dimaksimalkan untuk kemakmuran masyarakat. Daya tarik wisata alam dan keragaman budaya menjadi salah satu modal utama untuk pengembangan pariwisata adalah peluang besar bagi Indonesia untuk menarik lebih banyak wisatawan dari berbagai negara untuk berkunjung ke Indonesia (Aliansyah & Hermawan, 2021). Indonesia sendiri adalah salah satu wilayah yang memiliki potensi wisata air yang dapat untuk berlibur, beristirahat, dan rekreasi guna

kesehatan badan jasmani maupun rohani (Pendit, 1999:73). Menurut Anugerah Nontji (2016), Indonesia memiliki hampir 840 danau yang menjadi sumber kehidupan baik manusia, hewan dan tumbuhan di sekitarnya. Hal itu karena danau menyediakan sumber daya alam yang produktif baik sebagai sumber air baku minum, kebutuhan rumah tangga, sumber protein, mineral, energi, transportasi dan sebagai objek wisata. Pembangunan kepariwisataan diperlukan sinergitas antara berbagai macam layanan jasa dan pengembangannya menurut undang-undang Pariwisata meliputi kelembagaan pariwisata, industri pariwisata, destinasi pariwisata, pemasaran.

Jawa Tengah memiliki berbagai macam destinasi dari Kawasan Pengembangan Pariwisata Provinsi, Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi, dan Destinasi Pariwisata Provinsi berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012–2027. RIPPAPROV (Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi) merupakan pedoman untuk pembangunan kepariwisataan Provinsi sekaligus menjadi pedoman bagi Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten/ Kota.

Perwilayahan Destinasi Pariwisata Provinsi (DPP) di Jawa Tengah terbagi menjadi 6 DPP yang tersebar di 35 (tiga puluh lima) Kabupaten/Kota; terdapat 15 (lima belas) Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi (KSPP) dan terdapat 18 (delapan belas) Kawasan Pengembangan Pariwisata Provinsi. Beberapa perwilayahan tersebut diantaranya DPP Semarang–Karimunjawa dan sekitarnya yang meliputi: KSPP Karimunjawa dan sekitarnya, KSPP Semarang Kota dan

sekitarnya, KSPP Gedongsongo–Rawa Pening dan sekitarnya, KSPP Demak–Kudus dan sekitarnya, KPPP Kendal dan sekitarnya, KPPP Jepara dan sekitarnya, KPPP Pati dan sekitarnya, KPPP Purwodadi dan sekitarnya.

Pariwisata Rawa Pening dan sekitarnya menjadi bagian dari KSPP Gedongsongo–Rawa Pening dan sekitarnya; dalam regulasi sebelumnya Rawa Pening di Kabupaten Semarang merupakan bagian dalam Kawasan Pengembangan berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 14 Tahun 2004 Tentang Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah.

Menurut Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Balai Besar Wilayah Sungai Pemali Juana dalam Bahan Informasi Danau Rawa Pening 2021 bahwa Rawa Pening memiliki luas genangan danau mencapai 1.850,10 ha serta mempunyai banyak fungsi antara lain untuk irigasi, pembangkit listrik, pengendali banjir, air baku (air minum), perikanan darat, serta pariwisata, serta manfaat lain seperti pemanfaatan gambut untuk kompos.. Kawasan Rawa Pening secara administratif terletak di Kabupaten Semarang, Provinsi Jawa Tengah. Kawasan Rawa Pening dikelilingi oleh 4 kecamatan yaitu Kecamatan Banyubiru, Kecamatan Tuntang, Kecamatan Bawen, dan Kecamatan Ambarawa

Bukit Cinta Brawijaya Rawa Pening masuk pula kedalam KSPK (Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten) di dalam Peraturan Daerah Kabupaten

Semarang Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Semarang Tahun 2020 – 2025.

Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten merupakan kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata yang mempunyai pengaruh penting dalam satu atau lebih aspek, seperti pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung lingkungan hidup, serta pertahanan dan keamanan.

Kondisi alam Kabupaten Semarang yang menarik membuat obyek wisata di kabupaten ini cukup diminati oleh wisatawan. Obyek wisata yang tersebar di wilayah Kabupaten Semarang terbagi menjadi wisata alam, wisata budaya, wisata buatan, dan wisata minat khusus. Pada tahun 2021 tercatat terdapat 1.451.887 wisatawan yang berkunjung ke seluruh tempat wisata di Kabupaten Semarang. Angka ini menunjukkan peningkatan wisatawan dari tahun sebelumnya yaitu sebesar 12,05 persen. Sebagian besar wisatawan didominasi oleh wisatawan domestik yaitu sebanyak 1.451.670 wisatawan, sedangkan sisanya merupakan wisatawan asing yaitu sebanyak 217 wisatawan (BPS, 2022).

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2020, tempat rekreasi di Kabupaten Semarang, khususnya Rawa Pening, menduduki peringkat ketiga dengan jumlah pengunjung terbanyak setelah tempat rekreasi Candi Gedong Songo dan Cimory on The Valley, hal ini menandakan kawasan Rawa Pening termasuk kedalam daerah yang masih diminati sampai sekarang oleh pengunjung untuk berwisata. Disisi lain, Rawa Pening merupakan salah satu dari 15 danau

yang diutamakan di tingkat nasional yang merupakan warisan Provinsi Jawa Tengah. Rawa Pening tidak hanya memiliki nilai ekonomi dan nilai ekologi yang tinggi tetapi juga menjanjikan tawaran keadaan lingkungan seperti rawa dan persawahan yang cantik untuk menarik datangnya pengunjung. Berdasarkan data dari BPS, jumlah pengunjung Bukit Cinta Rawa Pening pada tahun 2021 berada di angka 61.308 mengalami penurunan jika dibandingkan di tahun 2020 yang mencapai 138.731 pengunjung. Kondisi Rawa Pening memiliki banyak peminat dikarenakan Rawa Pening merupakan sebuah pariwisata kampung rawa yang dikelola secara mandiri dan dikelola bersamaan dari berbagai macam pemangku kepentingan, di samping pula juga Rawa Pening menyediakan pemandangan Gunung Merbabu dan juga Gunung Telomoyo.

Dalam hal penginapan, menurut data dari Dinas Pariwisata, banyaknya hotel di Kabupaten Semarang tahun 2021 tercatat sebanyak 226 hotel, yang terdiri dari 13 hotel bintang, 196 hotel non bintang, dan 17 pondok wisata. Jumlah total kamar hotel yang tersedia sebanyak 4.723 kamar, sama dengan jumlah kamar hotel pada tahun 2020. Sementara itu, jumlah tempat tidur yang tersedia dan tenaga kerja berturut-turut sebesar 9.446 dan 1.442, tidak mengalami peningkatan ataupun penurunan dari tahun sebelumnya. Jika dilihat dari banyaknya tamu hotel, pada tahun 2021 terdapat 844.940 tamu yang menginap di hotel di Kabupaten Semarang, dengan kunjungan tertinggi pada bulan Desember yaitu sebanyak 66.026 tamu dan terendah pada bulan Juni yaitu sebesar 13.614 tamu. Sementara itu, rata-rata tingkat hunian kamar hotel pada tahun 2021 sebesar 24,22 persen, meningkat dibandingkan pada tahun 2020.

Pemerintah Kabupaten Semarang memiliki 46 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang terdiri atas Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Satuan Pamong Praja, 21 perangkat badan/dinas, dan 19 kecamatan dan 2 rumah sakit. SKPD yang menaungi terkait dengan kepariwisataan berada dibawah naungan Dinas Pariwisata namun hal ini perlu kerjasama antar lintas OPD karena pariwisata merupakan industri dan tata kelola lintas sektor, selain dari pemangku kepentingan swasta, dan peran dari masyarakat sipil.

Pada dasarnya sinergitas sering dikaitkan dengan istilah *Collaborative Governance*. Istilah tersebut merujuk pada implementasi dari konsep “*multipartner governance*” yang merupakan swasta (*private*), masyarakat sipil yang terbangun atas sinergitas peran pemangku kepentingan dalam menyusun kerangka rencana acuan yang bersifat hybrid seperti kerjasama publik dengan private dan swasta dengan social (Yunas, 2019:45) .

Pengkajian lebih dalam terkait dengan pengelolaan pariwisata bahari Kawasan Rawa Pening diperlukan untuk analisis terkait dengan peran para pemangku kepentingan untuk menciptakan suatu ketersesuaian maka diperlukan pendekatan sinergitas dan kolaborasi dengan pemangku kepentingan tersebut.

Dalam pelaksanaan sinergitas pengelolaan pariwisata diperlukan peran dari masyarakat diantaranya pengelola, masyarakat dan organisasi pecinta lingkungan serta berbagai pemangku kepentingan lainnya dalam pengelolaan pariwisata di Kawasan Rawa Pening. Menurut penelitian dari Raharjo, S. A. S., Falah, F., & Cahyono, S. A. (2019) peran berbagai pemangku kepentingan dalam

kepedulian lingkungan dapat terlihat kelembagaan Gerakan Penyelamatan Ekosistem Danau (Germadan) Rawa Peran yang merupakan lembaga gerakan yang melibatkan berbagai macam pemangku kepentingan.

Menurut Najiyati dan Rahmat (2011:15), sinergitas yang menitikberatkan kepada sinergitas berbagai pihak untuk memperoleh luaran yang lebih baik dan lebih besar, sehingga menghasilkan luaran yang lebih baik. Sinergitas yang baik dapat terjadi dengan 2 (dua) cara, yakni:

1. Komunikasi untuk memindahkan stimulasi guna menggapai tanggapan dengan tujuan agar seseorang dapat menerima stimulasi rangsangan; dan
2. Koordinasi dalam hal ini bermaksud untuk menciptakan sinergitas/kolaborasi yang baik demi mensupport proses kelancaran berkomunikasi. Koordinasi yang tepat dilakukan oleh semua pihak yang berkepentingan untuk dapat memecahkan suatu problem atau menciptakan gagasan baru.

Hasil dari beberapa studi menjelaskan bahwa kolaborasi/sinergitas dapat membawa hasil positif, hal ini dengan tujuan pencapaian solusi untuk kepentingan masing-masing, maka perlu mencapai kesepakatan yang fair di antara pemangku kepentingan, tiap-tiap pemangku kepentingan punya kapasitas untuk berpartisipasi dalam pengelolaannya, dengan begitu para pemangku kepentingan inti/penting lainnya setuju untuk berkolaborasi Gray (1989:11) mengungkapkan bahwa ada lima proses kolaborasi diantaranya yang maksimal seharusnya memenuhi lima karakteristik kunci: pemangku kepentingan yang saling bergantung, solusi dapat

muncul dengan menerima perbedaan secara konstruktif, keputusan dibuat berdasarkan persetujuan bersama, pemangku kepentingan bertanggung jawab dalam proses pengembangan suatu wilayah, dan kolaborasi merupakan proses yang dapat terus muncul.

Berbeda dengan penelitian dari Nadjib (2016:487-502) bahwa masih terdapat beberapa hambatan dari berbagai pemangku kepentingan dalam pencarian penyelesaian terhadap permasalahan Danau Rawa Pening, hal ini terlihat dari model pengelolaan yang sudah ada belum menunjukkan sinkronisasi, sehingga implementasi pengelolaan dinilai seperti “benang kusut”.

Hal ini diperkuat juga dengan hasil penelitian dari Yuliasri (2005) bahwa Dinas Pariwisata Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten Semarang perlu menyiapkan perencanaan pengembangan kepariwisataan secara holistik yang menekankan pentingnya kesejahteraan masyarakat disekitarnya, sehingga dapat terselenggaranya sebuah obyek wisata berkelanjutan. Selain itu, Dinas Pariwisata perlu mengatasi kondisi terkini terkait kepariwisataan Rawa Pening, antara lain yaitu meningkatkan pemasaran dengan promosi lebih intensif dan menarik, meningkatkan pelayanan dengan menambah fasilitas dan memperbaiki kualitas sarana dan prasarana, mengatasi persoalan eceng gondok dan sedimentasi dengan mengadakan penelitian, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia dengan mengadakan pelatihan dan kesempatan berwiraswasta di kawasan wisata Rawa Pening.

Bahwa dalam hal pengembangan pariwisata di Objek Wisata Bukit Cinta Rawa Pening mengalami kebaruan dalam hal penataan, revitalisasi dan pembangunan pada tahun 2018 oleh Dinas Perumahan Umum dan Perumahan Rakyat dengan nominal sebesar 69,5 miliar (pu.go.id, 2021)

Berdasarkan temuan dan beberapa permasalahan terkait pengembangan pariwisata dan sinergitas maka peneliti menganggap penting untuk menggali lebih lanjut terkait penembangan potensi pariwisata dan sinergitas pemangku kepentingan dalam mewujudkan *collaborative government*.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pengembangan potensi dalam pariwisata Bukit Cinta Rawa Pening?
2. Bagaimanakah sinergitas pemangku kepentingan dalam pengelolaan kawasan pariwisata Bukit Cinta Rawa Pening?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari uraian rumusan masalah tersebut yang dituliskan diatas maka tujuan yang ingin dicapai adalah:

1. Untuk menanalisis pengambangan potensi kawasan Pariwisata Bukit Cinta Rawa Pening

2. Untuk mendeskripsikan terkait sinergitas antar pemangku kepentingan dalam pengembangan kawasan pariwisata Bukit Cinta Rawa Pening

1.4 Kegunaan Penelitian

Penelitian ini memiliki dua kegunaan, yaitu manfaat akademis dan manfaat praktis:

1. Secara akademis, penelitian ini digunakan sebagai kajian Ilmu Pemerintahan terhadap analisis kebijakan sinergitas pemangku kepentingan dalam pembangunan wilayah.
2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan mampu menjadi bahan masukan serta pertimbangan bagi Dinas Pariwisata serta masyarakat, dalam pengelolaan objek-objek wisata di masa yang akan datang, selain itu, dapat menjadi sumber referensi bagi penelitian-penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan pengembangan objek wisata

1.5 TINJAUAN PUSTAKA

1.5.1 Pengembangan Pariwisata

Wibowo (2010) menyatakan bahwa pengembangan merupakan usaha untuk memajukan suatu objek menjadi lebih baik dan mempunyai hasil guna kepentingan bersama. Menurut Anindita (2015) pengembangan pariwisata adalah suatu usaha untuk mengembangkan atau memajukan objek wisata agar lebih baik dan menarik ditinjau dari segi tempat dan segala yang ada didalamnya untuk dapat menarik minat wisatawan untuk mengunjunginya. Sebagaimana dikemukakan Sobari dalam Anindita (2015), bahwa pengembangan pariwisata sebagai suatu industri secara ideal harus berlandaskan pada empat prinsip dasar:

1. Kelangsungan ekologi, yaitu bahwa pengembangan pariwisata harus menjamin terciptanya pemeliharaan dan proteksi terhadap sumber daya alam yang menjadi daya tarik pariwisata, seperti lingkungan laut, hutan, pantai, danau, dan sungai.
2. Kelangsungan kehidupan sosial dan budaya, yaitu bahwa pengembangan pariwisata harus mampu meningkatkan peran masyarakat dalam pengawasan tata kehidupan melalui sistem nilai yang dianut masyarakat setempat sebagai identitas masyarakat tersebut.
3. Kelangsungan ekonomi, yaitu bahwa pengembangan pariwisata harus dapat menciptakan kesempatan kerja bagi semua pihak untuk

terlibat dalam aktivitas ekonomi melalui suatu sistem ekonomi yang sehat dan kompetitif.

4. Memperbaiki dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat setempat melalui pemberian kesempatan kepada mereka untuk terlibat dalam pengembangan pariwisata.

Aspek pengembangan pariwisata menurut Kurniawan (2015) adalah sebagai berikut:

1. Atraksi Wisata, yaitu merupakan daya tarik yang timbul dari keadaan alam (keindahan panorama, flora dan fauna, sifat khas perairan laut, danau, dan lain sebagainya), objek buatan manusia (museum, masjid kuno, dan lain sebagainya), ataupun unsur-unsur budaya (kesenian, adat istiadat, makanan dan lain sebagainya).
2. Transportasi merupakan sesuatu yang berpengaruh atas arus wisatawan dan juga perkembangan akomodasi
3. Akomodasi, merupakan salah satu sarana untuk menyediakan jasa pelayanan penginapan yang dilengkapi dengan pelayanan makan dan minum serta jasa lainnya.
4. Fasilitas Pelayanan, yaitu penyediaan fasilitas dan pelayanan dan bervariasi sejalan dengan perkembangan.

5. Infrastruktur, yaitu untuk mendukung jasa pelayanan dan fasilitas pendukung. Pembangunan infrastruktur secara tidak langsung juga memberi manfaat bagi masyarakat sekitar.

Samsuridjal (1997) berpendapat bahwa suatu objek wisata dapat dikembangkan apabila memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

1. *Attraction* atau Atraksi Wisata, yaitu segala hal yang menjadi ciri khas ataupun keunikan dan menjadi daya tarik wisatawan dengan tujuan agar wisatawan mau datang berkunjung ke tempat wisata

2. *Accessibility* atau Aksesibilitas, yaitu kemudahan yang diperoleh wisatawan untuk mencapai tempat wisata wisata tersebut.

3. *Amenity* atau Fasilitas Pendukung, yaitu fasilitas yang tersedia di daerah objek wisata seperti akomodasi penginapan dan fasilitas restoran.

4. *Institution* atau Kelembagaan, yaitu lembaga atau organisasi terkait yang mengelola objek wisata tersebut.

Pendapat lain mengenai aspek pengembangan pariwisata juga disampaikan oleh Spillane (1987) dalam Badrudin (2001) dalam Sari (2010) yaitu:

a. *Attraction*, yaitu berupa daya tarik dan dapat digolongkan menjadi *site attraction* dan *event attraction*. *Site attraction* merupakan daya tarik fisik yang permanen dengan lokasi yang tetap, sedangkan *event*

attraction merupakan atraksi yang berlangsung sementara dan lokasinya dapat diubah

b. *Facilities*, berorientasi pada daya tarik di suatu lokasi karena fasilitas harus terletak dekat dengan pasarnya. Wisatawan pasti membutuhkan fasilitas seperti penginapan, toko souvenir, restoran, tempat sampah dan lain sebagainya

c. *Infrastructure*, yaitu infrastruktur dasar dari suatu daerah dapat dimanfaatkan oleh wisatawan dan masyarakat lokal untuk pengembangan pariwisata

d. *Transportation*, yaitu berupa moda transportasi baik darat, udara, maupun laut

e. *Hospitality*, yaitu fasilitas pelayanan berupa keamanan dan perlindungan wisatawan agar merasa aman dan nyaman selama perjalanan wisata.

Dari beberapa pendapat ahli maka dapat disimpulkan bahwa pengembangan pariwisata adalah usaha untuk mengembangkan atau memajukan objek wisata yang terdiri dari berbagai aspek di dalamnya

1.5.2. Sinergitas

Pamudji (1985:12) dalam Dhulhijjahyani (2020) dalam menjelaskan bahwa pada hakikatnya sinergi mengidentifikasi adanya kedua belah pihak atau lebih yang berinteraksi dan menjalin hubungan yang bersifat dinamis guna

mencapai tujuan bersama. Pamudi menjelaskan dalam kerjasama termuat berbagai unsur yaitu: adanya dua pihak atau lebih, unsur terkait, dan tujuan bersama. Indikator untuk menganalisis sinergitas mengacu pada Doctoroff (1977: 76), yakni syarat utama bagi suatu sistem sinergi yang ideal adalah mencakup indikator komunikasi yang efektif, umpan balik yang responsif, kreativitas dan kepercayaan.

Doctoroff memberikan tambahan bahwa yang ideal bagi suatu sistem sinergi adalah kepercayaan, komunikasi yang efektif, umpan balik yang cepat, dan kreativitas. Menurut Iversen (1997:38), terdapat prinsip dasar yang dijadikan acuan dalam sinergitas, yaitu koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi. Sinergi didefinisikan sebagai proses pengintegrasian tujuan dan kegiatan perusahaan atau Pemerintahan pada satuan yang terpisah dalam suatu organisasi untuk mencapai tujuan organisasi secara efisien dan efektif.

Sofyandi dan Garniwa (2007) dalam Rahmawati, (2013: 643), pengertian komunikasi dapat dibedakan atas dua bagian, yaitu:

- a. Pengertian komunikasi yang berorientasi pada sumber menyatakan bahwa, komunikasi adalah kegiatan dengan mana seseorang (sumber) secara sungguh-sungguh memindahkan stimuli guna mendapatkan tanggapan.
- b. Pengertian komunikasi yang berorientasi pada penerima yang memandang bahwa, komunikasi sebagai semua kegiatan dimana seseorang (penerima) menanggapi stimulus atau rangsangan.

Terdapat indikator dalam pelaksanaan sinergitas untuk mencapai jaminan kesehatan semesta, dengan sinergitas, maka yang hubungan antar aktor dalam mencapai kepentingan bersama dapat diwujudkan. Menurut Najiyati dan Rahmat (2011:15), terdapat dua cara untuk mencapai sinergitas, yaitu; komunikasi dan koordinasi:

1. Komunikasi, sebagaimana yang dijelaskan oleh Sofyandi dan Garniwa (dalam Rahmawati, 2013: 643) menjelaskan bahwa komunikasi terdapat dua bagian, komunikasi yang bersumber dengan awalnya menyatakan bahwa kegiatan dimana seseorang secara sungguh-sungguh memindahkan stimulan guna mendapatkan tanggapan. Setelah itu komunikasi yang berorientasi pada penerima, dimana seseorang (penerima) menanggapi stimulus atau rangsangan.
2. Koordinasi, sebagaimana yang dijelaskan oleh Silalahi (dalam Rahmawati, 2013: 643) merupakan untuk mencapai sinergitas dibutuhkan dalam koordinasi antar aktor. Lebih lanjut, Silalahi menyampaikan bahwa koordinasi adalah integrasi dari kegiatan-kegiatan individu dan unit-unit dalam satu usaha bersama yaitu bekerja ke arah tujuan bersama. Komunikasi tidak dapat berdiri sendiri tanpa adanya koordinasi seperti yang dinyatakan oleh Silalahi (dalam Rahmawati, 2013: 643), “koordinasi adalah integritas dari kegiatan-kegiatan individual dan unit-unit ke dalam suatu usaha bersama yaitu bekerja ke arah tujuan yang bersama”.

Moekijat (dalam Rahmawati, 2013: 643) menyebutkan ada 9 (Sembilan) syarat untuk mewujudkan koordinasi yang efektif, yaitu :

- a. Hubungan langsung. Bahwa koordinasi dapat lebih mudah dicapai melalui hubungan pribadi langsung.
- b. Kesempatan awal Koordinasi dapat dicapai lebih mudah dalam tingkat-tingkat awal perencanaan dan pembuatan kebijaksanaan.
- c. Kontinuitas. Koordinasi merupakan suatu proses yang kontinu dan harus berlangsung pada semua waktu mulai dari tahap perencanaan.
- d. Dinamisme. Koordinasi harus secara terus-menerus diubah mengingat perubahan lingkungan baik intern maupun ekstern.
- e. Tujuan yang jelas. Tujuan yang jelas itu penting untuk memperoleh koordinasi yang efektif.
- f. Organisasi yang sederhana. Struktur organisasi yang sederhana memudahkan koordinasi yang efektif.
- g. Perumusan wewenang dan tanggung jawab yang jelas. Wewenang yang jelas tidak hanya mengurangi pertentangan di antara pegawai-pegawai yang berlainan, tetapi juga membantu mereka dalam pekerjaan dengan kesatuan tujuan.
- h. Komunikasi yang efektif. Komunikasi yang efektif merupakan salah satu persyaratan untuk koordinasi yang baik.
- i. Kepemimpinan supervisi yang efektif

1.5.3. Pemangku Kepentingan

Definisi pemangku kepentingan menurut Menurut Hetifah (2003:3) pemangku kepentingan dimaknai sebagai individu, kelompok atau organisasi yang memiliki kepentingan, terlibat, atau dipengaruhi (secara positif maupun negatif) oleh kegiatan atau program pembangunan. Setiap pemangku kepentingan memiliki peran yang berbeda yang perlu dipahami sedemikian rupa agar pengembangan objek dan daya tarik wisata di suatu daerah dapat terwujud dan terlaksana dengan baik.

Menurut Bryson (2005:60) pemangku kepentingan didefinisikan sebagai “orang, kelompok, atau organisasi apapun yang dapat melakukan klaim atau perhatian, sumber daya, atau hasil (output) organisasi, atau dipengaruhi oleh hasil itu. Dalam studi kebijakan, analisis peran pemangku kepentingan dilakukan untuk mengungkapkan kepentingan dan pengaruh (peranan) para pemangku kepentingan. Menurut Bryson dalam Hardiansyah (2012:190) analisis peran pemangku kepentingan dimulai dengan menyusun pemangku kepentingan pada matriks dua kali dua menurut interest (minat) pemangku kepentingan terhadap suatu masalah dan power (kekuasaan) pemangku kepentingan dalam mempengaruhi masalah tersebut. Istilah pemangku kepentingan pertama kali dikemukakan oleh Stanford Research Institute (SRI) pada tahun 1963 (Freeman, 1984). Freeman mengatakan teori pemangku kepentingan adalah teori yang menggambarkan kepada pihak mana saja perusahaan bertanggung jawab.

Pengertian tersebut tersebut dapat dipahami pula bahwa yang mengikat masing-masing pemangku kepentingan adalah kepentingan yang saling mempengaruhi terhadap suatu cita-cita bersama/isu yang diangkat. Dalam hal ini pemangku kepentingan adalah berbagai pihak yang saling berkolaborasi, dengan tujuan untuk sinergitas dalam pengembangan suatu hal yang diperjuangkan bersama.

Menurut Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2011 bahwa pemangku kepentingan merupakan pihak-pihak dari dalam dan luar organisasi/instansi yang berkepentingan dan berpengaruh terhadap kinerja organisasi/instansi sehingga tercipta tata kelola Pemerintahan yang baik. Hubungan instansi Pemerintah dengan pemangku kepentingan merupakan hasil akhir dari rangkaian kegiatan:

1. pengumpulan data tentang pemangku kepentingan organisasi/instansi;
2. pengolahan dan analisis data;
3. diskusi tentang kriteria penentuan klasifikasi pemangku kepentingan;
4. penetapan strategi;
5. perumusan berbagai pendekatan dan agenda program yang dilaksanakan secara bersama-sama dengan pemangku kepentingan.

1.5.4 Collaborative Governance

Ansell dan Gash (Ansell dan Gash, 2007:544) mendefinisikan mengenai *Collaborative Governance* sebagai susunan Pemerintahan dimana satu atau lebih sektor publik secara langsung terlibat dengan pemangku kepentingan non Pemerintah dalam pengambilan keputusan kolektif, berorientasi konsensus, deliberatif, bertujuan untuk membuat atau mengimplementasikan kebijakan publik atau mengelola kebijakan program atau mengelola suatu aset.

Definisi hampir serupa disampaikan oleh Balogh (2011:2) bahwa *Collaborative Governance* merupakan sebuah proses dan struktur dalam manajemen dan perumusan keputusan kebijakan publik yang melibatkan aktor-aktor yang secara konstruktif berasal dari berbagai level, baik dalam tataran Pemerintahan dan atau instansi publik, institusi swasta dan masyarakat sipil dalam rangka mencapai tujuan publik yang tidak dapat dicapai apabila dilaksanakan oleh satu pihak saja.

Penerapan *Collaborative Governance* dilakukan antar pemangku kepentingan sebagai suatu respon dalam penanganan permasalahan publik. Penjelasan tersebut menjelaskan bahwa masing-masing pemangku kepentingan membawa kepentingannya dengan niat dan arahan bersama serta bertujuan untuk menengahi konflik yang terjadi dikemudian hari.

Disamping pendapat tersebut, pendapat lain mengenai *Collaborative Governance* dikemukakan Agranoff dan McGuire dalam Chang (2009:76-77) yang menyatakan, Secara khusus, *Collaborative Governance* telah menempatkan

banyak penekanan pada aspek kolaborasi horizontal yang bersifat sukarela dan hubungan horizontal antara partisipan multisektoral, karena tuntutan dari klien sering melampaui kapasitas dan peran organisasi publik tunggal, dan membutuhkan interaksi di antara berbagai organisasi yang terkait dan terlibat dalam kegiatan publik. kolaborasi diperlukan untuk memungkinkan *governance* menjadi terstruktur sehingga efektif memenuhi meningkatnya permintaan yang timbul dari pengelolaan lintas Pemerintah, organisasi, dan batas sektoral.

Sedangkan pada gagasan Agranoff dan McGuire menunjukkan bahwa *Collaborative Governance* atau kolaborasi penyelenggaraan Pemerintahan dalam lingkup yang lebih general yakni penyelenggaraan Pemerintahan secara keseluruhan. *Collaborative Governance* dalam hal ini lebih menitik beratkan pada aspek sukarela dalam praktik kolaborasi. Aspek kesukarelaan tersebut diharapkan setiap aktor yang terlibat dalam kolaborasi bekerja secara optimal untuk tercapainya tujuan dalam kolaborasi. Sehingga program atau kebijakan yang dilaksanakan dapat terlaksana lebih efektif karena melibatkan relasi organisasi atau institusi.

Junaidi (2015:8) menyebutkan bahwa *Collaborative Governance* tidak muncul secara tiba-tiba karena hal tersebut terjadi disebabkan oleh inisiatif dari berbagai pihak yang mendorong untuk dilakukannya kerjasama dan koordinasi dalam menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi oleh publik. Proses dari suatu kolaborasi dilakukan dalam beberapa tahapan. Suatu tahapan model kolaborasi menjadi penting untuk diperhatikan sebagai strategi dalam aspek pengelolaan suatu urusan publik. Meskipun proses kolaboratif sulit untuk

dilaksanakan 38 karena karakter-karakter dari tiap pemangku kepentingan yang berbeda satu dengan yang lainnya. Ansell dan Grash (2007:558 - 561) sebagai berikut:

a) *Face to face dialog*

Semua bentuk collaborative governance dibangun dari dialog tatap muka secara langsung dari tiap pemangku kepentingan yang terlibat. Sebagaimana collaborative governance yang berorientasikan proses, dialog secara langsung sangat penting dalam rangka mengidentifikasi peluang dan keuntungan bersama. Dialog secara tatap muka langsung bukanlah semata-mata merupakan negosiasi yang ala kadarnya. Dialog secara langsung ini dapat meminimalisir antagonisme dan disrespect dari antar pemangku kepentingan yang terlibat. Sehingga, pemangku kepentingan dapat bekerja sama sesuai dengan tujuan dan kebermanfaatannya bersama.

b) *Trust building*

Buruknya rasa percaya antar pemangku kepentingan memang merupakan hal yang lumrah di awal proses kolaborasi. Kolaborasi memang bukan semata tentang negosiasi antar pemangku kepentingan, namun lebih dari itu merupakan upaya untuk saling membangun kepercayaan satu dengan yang lainnya. Membangun kepercayaan perlu dilakukan sesegera mungkin ketika proses kolaborasi pertama dilakukan. Hal ini diupayakan agar para pemangku kepentingan tidak mengalami egosentrisme antar institusi. Oleh karenanya, dalam membangun

kepercayaan ini, diperlukan pemimpin yang mampu menyadari bahwa pentingnya berkolaborasi.

c) *Commitment to process*

Komitmen tentunya memiliki relasi yang kuat dalam proses kolaborasi. Komitmen merupakan motivasi untuk terlibat atau berpartisipasi dalam *Collaborative Governance*. Komitmen yang kuat dari setiap pemangku kepentingan diperlukan untuk mencegah resiko dari proses kolaborasi. Meskipun komitmen memang merupakan hal yang rumit dalam kolaborasi. Komitmen merupakan tanggung jawab dari pemangku kepentingan supaya memandang relasi yang dilakukan sebagai hal yang baru dan tanggungjawab tersebut perlu dikembangkan.

d) *Share Understanding*

Pada poin yang sama dalam proses kolaborasi, pemangku kepentingan yang terlibat harus saling berbagi pemahaman mengenai apa yang dapat mereka capai melalui kolaborasi yang dilakukan. Saling berbagi pemahaman ini dapat digambarkan sebagai misi bersama, tujuan bersama, objektivitas umum, visi bersama, ideologi yang sama, dan lain-lain. saling berbagi pemahaman dapat berimplikasi terhadap kesepakatan bersama untuk memaknai dan mengartikan suatu masalah.

e) *Intermediate outcomes*

Hasil lanjutan dari proses kolaborasi terwujud dalam bentuk output atau keluaran yang nyata. Hal ini merupakan hasil proses yang kritis dan

esensial dalam mengembangkan momentum yang dapat membimbing demi keberhasilan suatu kolaborasi. Intermediate outcomes ini muncul apabila tujuan yang mungkin dan memberikan keuntungan dari kolaborasi yang mana secara relative konkrit dan ketika “small wins” dari suatu kolaborasi dapat dimungkinkan terjadi

1.5.5 Potensi Wisata

Pengertian potensi wisata menurut Sukardi (1998:67) merupakan segala sesuatu yang dipunyai oleh suatu daerah sebagai daya tarik wisata dan memiliki nilai guna dalam pengembangan industri pariwisata di daerah tersebut. Sedangkan menurut Mariotti dalam Yoeti (1996:160-162) potensi wisata merupakan segala sesuatu yang dimiliki oleh daerah tujuan wisata, dan merupakan daya tarik dengan tujuan agar orang mau datang berkunjung ke tempat tujuan wisata.

Sujali (dalam Amdani, 2008) menyebutkan bahwa potensi wisata merupakan kemampuan dalam suatu wilayah yang mungkin dapat dimanfaatkan untuk pembangunan, seperti alam, manusia serta hasil karya manusia itu sendiri. Sujali (1989: 41) menjelaskan pula bahwa komponen penting yang perlu dipersiapkan untuk mendapatkan gambaran kualitas potensi objek wisata, yaitu:

- a. Tersedianya objek wisata yang dapat dinikmati atau adanya atraksi yang dapat dilihat.
- b. Tersedianya sarana transportasi dan perhubungan.
- c. Komponen penunjang yang berupa akomodasi dan sarana infrastruktur.

Potensi pariwisata menurut Nawangsari (2018:32) merupakan berbagai sumber daya yang dimiliki oleh suatu daerah atau tempat yang dapat dikembangkan menjadi suatu atraksi wisata yang dapat dimanfaatkan baik untuk kepentingan ekonomi dengan tetap memperhatikan aspek yang lainnya. Potensi pariwisata ini adalah sesuatu yang dimiliki oleh suatu wisata dan menjadi daya tarik bagi wisatawan dan dimiliki oleh tempat wisata itu sendiri. Potensi wisata ini juga merupakan segala sesuatu yang dimiliki dan ada di daerah tujuan wisata dan menjadi daya tarik untuk para pengunjung berkunjung ke tempat tersebut. Potensi yang dapat dimanfaatkan itu berupa kesenian, kebudayaan baik nasional maupun daerah, keindahan alam, flora dan fauna maupun hal lainnya yang perlu dijaga kelestariannya.

1.5.6 Operasionalisasi Konsep

Proposal skripsi dengan judul “Analisis Pengembangan Potensi Dan Sinergitas Pemangku Kepentingan Dalam Pembangunan Pariwisata Bukit Cinta Rawa Pening” ini membahas terkait pengelolaan potensi pariwisata dan hubungan sinergitas antar pemangku kepentingan dalam pengelolaan pariwisata Kawasan Rawa Pening. Hal ini berangkat dari temuan bahwa pengelolaan potensi pariwisata kawasan Bukit Cinta Rawa Pening dan sinergitas antar pemangku kepentingan masih belum optimal, maka dari itu Peneliti tertarik untuk mengkaji lebih dalam terkait dengan hal tersebut, dalam upaya untuk mendeskripsikan terkait sinergitas antar pemangku kepentingan dan potensi pengelolaan pariwisata kawasan Bukit Cinta Rawa pening, dari proposal skripsi ini dapat variabel-variabel yang diukur diantaranya:

No	Dimensi	Variabel	Indikator
1.	Pengembangan Pariwisata (Samsuridjal, 1997), (Kurniawan, 2015), (Sari, 2011)	Atraksi Wisata	<ul style="list-style-type: none"> ● Banyaknya objek daya tarik wisata
		Aksesibilitas	<ul style="list-style-type: none"> ● Kemudahan wisatawan untuk mengakses objek wisata
		Akomodasi dan Fasilitas Pendukung	<ul style="list-style-type: none"> ● Banyaknya fasilitas kebersihan ● Banyaknya fasilitas penginapan ● Banyaknya fasilitas jasa pendukung pariwisata
		Infrastruktur	<ul style="list-style-type: none"> ● Banyaknya infrastruktur wisata yang telah dibangun dan sedang dibangun
		Kelembagaan	<ul style="list-style-type: none"> ● Lembaga atau organisasi terkait yang mengelola pariwisata.
2.	Sinergitas (Rahmawati, 2013)	Komunikasi	<ul style="list-style-type: none"> ● Banyaknya agenda pertemuan bersama yang dilakukan antar pemangku

			kepentingan
		Koordinasi	<ul style="list-style-type: none"> ● Pembagian kerja dan tanggung jawab ● Banyaknya kesepakatan-kesepakatan yang terjalin.
3.	<i>Collaborative Governance</i> (Ansell dan Grash, 2007)	Kolaboratif	<ul style="list-style-type: none"> ● Terdapat dialog bersama antar pemangku kepentingan ● Terdapat rasa saling percaya antar pemangku kepentingan ● Komitmen saling kolaborasi antar pemangku kepentingan ● Terdapat kesepahaman bersama ● Terdapat output sementara dari hasil kerjasama/kolaborasi

1.6 METODE PENELITIAN

1.6.1 Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Metode kualitatif menurut Denzin dan Lincoln (1994:1) menyatakan bahwa penelitian kualitatif

merupakan penelitian latar ilmiah dengan maksud menerjemahkan fenomena yang terjadi dengan melibatkan metode yang ada. Penelitian kualitatif merupakan metode-metode untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang oleh sejumlah individu atau sekelompok orang dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan (Creswell 2016, hlm. 4).

Penelitian ini juga bersifat kualitatif deskriptif, yaitu mencoba menggambarkan sebagai situasi, kondisi, atau berbagai realitas relasi Pemerintah, swasta, dan masyarakat sebagai yang objek penelitian, dan berupaya menarik temuan dari analisis tersebut tersebut ke permukaan sebagai suatu ciri tentang keterkaitan *Collaborative Government*. Sehingga dalam hal ini penggunaan metode kualitatif deskriptif dalam penelitian ini dapat mampu menggali dan dapat lebih mengeksplorasi terkait pengembangan pariwisata Objek Bukit Cinta Rawa Pening beserta sinergitas pemangku kepentingan yang terjadi.

1.6.2 Lokasi Penelitian dan Subjek Penelitian

1.6.2.1 Lokasi Penelitian

Tempat atau wilayah yang diambil adalah yakni di Bukit Cinta Brawijaya Rawa Pening, Kebondowo, Bukit Cinta, Kec Banyubiru, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah.

1.6.2.1 Subjek Penelitian

Menurut Suharsimi Arikunto (2007:152) subjek penelitian merupakan sesuatu yang sangat penting kedudukannya di dalam penelitian,

subjek penelitian harus ditata sebelum peneliti siap untuk mengumpulkan data. Subjek Penelitian adalah suatu yang diteliti baik orang, benda, ataupun lembaga (organisasi). Menurut Iskandar (2008:177) dalam Penelitian tentu ada subjek yang hendak diteliti, subjek penelitian haruslah yang bisa mewakili apa yang diteliti. Menjelaskan subjek atau populasi, sampel, atau informan haruslah dijelaskan secara jelas dan spesifik yang berhubungan dengan konteks penelitian. Adapun yang menjadi subjek penelitian dalam penelitian ini adalah:

1. Suyamto S.E, M.Ak selaku Kepala UPTD Dinas Pariwisata Kabupaten Semarang
2. Sarwono, SE selaku Kepala Bidang Pengembangan Daya Tarik Wisata
3. Hendrastuti Ikasari, S.S, M. Par selaku Kepala Seksi Promosi dan Pengembangan Pasar Pariwisata
4. Nova Adi selaku Staf Bidang Angkutan Dinas Perhubungan Kabupaten Semarang
5. Woko Listiana selaku Paguyuban Silverboat
6. Nur Salleh selaku Ketua Paguyuban Rawa Pesona
7. Yuni Farida selaku Pedagang Kios UMKM,
8. Sutopo Anggarito selaku Paguyuban Seni Budaya Banyubiru,
9. Sukamto selaku Ketua Dusun Kebondowo,
10. Fajar Saputra selaku Pengunjung

1.6.3 Ruang Lingkup Penelitian

Batasan materi adalah penentuan batasan atau fokus penelitian ini yang akan menjadi bahasan dalam kajian ini. Materi atau fokus dalam penelitian ini diarahkan untuk mengulas pengembangan Objek Pariwisata Bukit Cinta Rawa Pening dan sinergitas yang terjadi antar pemangku kepentingan di dalam Objek Bukit Cinta Rawa Pening.

1.6.3.1 Batasan Waktu Penelitian

Batasan waktu penelitian merupakan waktu yang ditentukan oleh peneliti untuk menganalisa data yang telah dikumpulkan. Batasan waktu yang diteliti terkait penelitian ini dihitung dari tahun 2017 hingga bulan Juni 2023 dengan waktu penelitian dilakukan dari November 2022 hingga bulan Juni 2023. Batasan awal ditentukan pada titik awal tahun 2017 dalam rangka untuk melihat dampak sebelum pembangunan Objek Pariwisata Bukit Cinta Pening dan sesudah pembangunan yang dilakukan oleh Kementerian Perumahan Umum dan Perumahan Rakyat PUPR di tahun 2018–2019, maka perkembangan setelah pembangunan akan dilihat sampai pertengahan tahun 2023.

1.6.4 Sumber dan Jenis Data

Sumber-sumber data dalam penelitian ini menggunakan sumber data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang didapatkan secara langsung melalui hasil langsung berdasarkan keadaan empiris di lapangan yang berupa

wawancara terbuka serta observasi. Sedangkan data sekunder adalah data yang didapat/dihasilkan dari, instansi, badan, lembaga, dinas yang berupa lembaran undang-undang, keputusan dari Pemerintah, monografi, dan berbagai data yang berkaitan dengan penelitian.

1.6.5 Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggambarkan dua deskripsi dari latar belakang yang berbeda, dan metode lainnya sering disebut dengan pendekatan triangulasi. Triangulasi merupakan metode dilakukan dengan cara mengkomparasikan informasi atau data dengan cara yang berlainan. Sebagaimana yang diketahui, dalam penelitian kualitatif peneliti sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi merupakan aktivitas penelitian dalam rangka mengumpulkan data yang berkaitan dengan masalah penelitian melalui proses pengamatan langsung di lapangan. Peneliti berada di tempat yang dituju untuk mendapatkan bukti-bukti yang valid dalam laporan yang diajukan. Observasi adalah metode pengumpulan data dimana peneliti mencatat informasi sebagaimana yang mereka saksikan selama penelitian (W. Gulo, 2002: 116). Dalam observasi ini peneliti menggunakan jenis observasi non partisipan, yaitu peneliti hanya mengamati secara langsung keadaan objek, tetapi peneliti tidak aktif dan ikut serta secara langsung (Husain Usman, 1995: 56).

2. Wawancara

Wawancara merupakan percakapan dengan tujuan untuk menggali informasi tertentu. Percakapan dalam wawancara dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (interview) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu (Lexy J. Moleong, 2010: 186). Ciri utama wawancaranya adalah kontak langsung dengan tatap muka antara pencari informasi dan sumber informasi. Dalam wawancara telah disiapkan berbagai macam pertanyaan-pertanyaan tetapi tidak luput pula berbagai pertanyaan terbuka lain ketika peneliti melakukan penelitian.

Untuk mendapatkan keabsahan informasi yang baik dan gambaran yang tepat mengenai informasi tertentu, peneliti dapat menggunakan metode wawancara bebas atau wawancara terstruktur dan terukur. Peneliti dapat menggunakan wawancara dan observasi atau pengamatan untuk memantau kebenarannya. Selain itu, peneliti juga bisa menggunakan wawancara kepada informan yang berbeda untuk mengecek serta memvalidasi kebenaran informasi tersebut.

3. Dokumentasi

Penggunaan dokumen telah sudah lama digunakan dalam penelitian sebagai sumber data dikarenakan dalam banyak hal dokumen merupakan sumber data yang dimanfaatkan untuk menguji, menafsirkan, bahkan untuk meramalkan (Lexy J. Moleong, 2010: 217).

Metode dokumentasi ini digunakan oleh peneliti untuk mengetahui data-data tertulis maupun data lain yang berkaitan tentang pengembangan, peran masing-masing pemangku kepentingan, serta dokumen dokumen lain yang berkaitan dengan penelitian.

1.6.6 Teknik Analisis dan Interpretasi Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian metode kualitatif ini adalah dengan menerangkan deskripsi dalam menganalisis data yang telah didapat dan selanjutnya dijabarkan dalam bentuk penjelasan yang sebenarnya serta dilakukan secara mendalam.

Terkait langkah-langkah dalam melakukan analisis adalah sebagai berikut:

1. Analisis data mentah

Data mentah adalah data yang belum diolah atau masih asli yang diperoleh dari hasil wawancara dan hasil observasi. Data ini didasari pertanyaan bersifat umum, transkrip wawancara, dan dokumentasi

2. Reduksi data

Dengan jumlah data lapangan yang diperoleh dari hasil wawancara dan observasi sangat banyak, maka peneliti perlu mencatat secara rinci agar dapat dianalisis segera dengan cara merangkum dan memilah hal-hal pokok yang terkait dengan pokok tema penelitian melalui reduksi data dengan mencari pola- polanya.

3. Membaca data

Dalam hal ini, peneliti sudah mendapat gagasan umum dan inti pokok dari hasil yang didapat dari lapangan bersama partisipan dari proses reduksi data. Mulai dengan mencatat hasil kredibilitas dan penuturan informasinya secara jelas.

4. Coding data

Memberi kode pada data data yang sudah dirangkum dan disatukan berdasarkan kolom kolom khusus yang berkaitan dengan tema. Mengkategorisasikan data dalam kategori- kategori tertentu.

5. Membuat deskripsi

Menyajikan kembali tema- tema dalam bentuk narasi atau laporan penelitian.

6. Triangulasi

Mengecek dan membandingkan data yang sudah dikategorikan dan dideskripsikan satu sama lain berdasarkan narasumber yang berbeda untuk mencapai penemuan yang diharapkan.

1.6.7 Kualitas Data

Teknik yang digunakan untuk menguji sahnya data dengan teknik triangulasi data. Triangulasi data merupakan teknik pengecekan data untuk tujuan sebagai pengecekan apakah proses dan hasil yang dapat diperoleh sudah dipahami secara baik oleh peneliti berdasarkan apa yang dimaksudkan oleh narasumber/informan. Cara yang dilakukan yaitu antara lain sebagai berikut:

1. Melakukan wawancara dengan narasumber/informan secara mendalam.

2. Melakukan uji silang antar informasi yang didapat oleh informan/narasumber dengan hasil informasi dari fakta empiris lapangan.
3. Melakukan pemastian atas hasil yang diperoleh kepada informan lain atau dari sumber-sumber lain.